

PERJALANAN DEMOKRASI INDONESIA DAN PROBLEMATIKANYA

Muhammad Kaulan Karima¹, Syazwina Dinda Damara Rais², Putri Hasanah Harahap³, Fitri Ana Daulay⁴, Eyzi Pratiwi⁵, Zaura Izzati Siagian⁶, Buti Sarma Sitompul⁷, Nur Nani Siagian⁸, Nuri Alfitriyani⁹, Tasya Sabrina¹⁰
Universitas Bina Bangsa Getsempena¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²⁻¹⁰

Email : kaulan@bbg.ac.id¹, syazwinadinda@gmail.com²⁻¹⁰

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraannya yang diwakilkan melalui Lembaga perwakilan. Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode, hingga saat ini menjalani periode reformasi. Kemajuan masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lahirnya partai-partai politik dan yang mendorong terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui proses perjalanan demokrasi di Indonesia serta problematikanya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis beberapa artikel dan buku yang relevan. Negara yang berdemokrasi, tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari sebuah demokrasi atau dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kepemimpinan. Penelitian ini memberikan pemahaman dalam pentingnya mengetahui proses perjalanan demokrasi di Indonesia dan problematikanya.

Kata kunci: Demokrasi Indonesia, Perjalanan, Problematika

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that adheres to a democratic system, namely the people as power holders, decision makers and the highest policy holders in their implementation are represented through representative institutions. Indonesia in its democratic journey has experienced several periods, until now it is undergoing a period of reform. The progress of Indonesian society is a factor that greatly influences the birth of party politics and encourages the formation of a multiparty system in Indonesia. The purpose of writing this article is to find out the process of

the journey of democracy in Indonesia and its problems. The research method used is literature study by collecting and analyzing several relevant articles and books. A democratic country certainly justifies the existence of political parties as pillars of democracy or in the implementation of the defeat of the people. Democracy is implemented through general elections in the context of leadership. This research provides an understanding of the importance of knowing the process of the journey of democracy in Indonesia and its problems.

Keywords : Indonesia Democracy, State Society, Problematic

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pada awalnya banyak yang menganut sistem pemerintahan. Namun di antara semua sistem pemerintahan tersebut, yang bertahan dari reformasi tahun 1998 adalah sistem pemerintahan yang demokratis. Meski ada celah dan tantangan. Beberapa kelompok telah merasa merdeka atas diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya kebebasan pers menempati ruang yang sebebas-bebasnya, memberikan hak kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya masing-masing. Demokrasi di Indonesia sangat penting dan sesuai dengan identitas nasional Indonesia. Kita lihat dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, juga dari sekian banyak suku, budaya dan bahasa, merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Indonesia adalah negara yang menggunakan demokrasi pancasila, yang harus dilandasi oleh nilai-nilai pancasila. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan bagian integral dari negara Indonesia, dengan pergantian kekuasaan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Indonesia memiliki sejarah demokrasi yang panjang mulai dari Priode 1945-1959 atau disebut sebagai demokrasi parlementer sampai pada 1998 atau era reformasi.

Perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia selama ini telah mengalami beberapa fase. Dimana dalam setiap periode terdapat dinamika dan problematika pencapaian demokrasi di Indonesia. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai pada demokrasi di era reformasi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perjalanan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia menganut sistem representasi atau perwakilan, bukan demokrasi secara langsung. Pemilihan demokrasi secara perwakilan ini merupakan bentuk jalan khidmat bangsa Indonesia dalam mematuhi Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi perwakilan juga sangat selaras dengan tekstur geografis Indonesia dan postur demografis yang sangat besar. Bentuk konkret dalam penerapan demokrasi secara perwakilan dalam ranah politik adalah pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di eksekutif dan legislatif melalui instrumen pemilihan umum yang berlangsung secara bersih dan demokratis. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, demokrasi perwakilan ini terwujud dalam pengelolaan sumber kekayaan alam yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai aparatur negara guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan metode studi perpustakaan (Library Research) yang melibatkan penjelasan terhadap buku-buku dan artikel yang relevan dengan objek kajian tentang Perjalanan Demokrasi di Indonesia dan Problematikanya. Tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan literatur yang relevan dan mempelajarinya secara mendalam, serta melakukan diskusi untuk membahas konten yang terkait dengan materi yang ada di dalam buku tersebut agar dapat menyusun artikel ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel-artikel terkait dari sumber-sumber terpercaya. Dalam penulisan ini, analisis data akan dilakukan melalui dua tahap: tahap pemilihan dan tahap analisis isi. Pada tahap pemilihan, data yang relevan akan diidentifikasi dan dipilih dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kemudian, pada tahap analisis isi, data yang terpilih akan dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dan pendekatan multidisipliner yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjalanan Demokrasi Di Indonesia

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Mekanisme pemerintahan presidensial harus bertanggung jawab kepada MPR di mana MPR adalah badan yang dipilih secara populer. (Nihaya, 2011: 16)

Menurut Montesque, demokrasi adalah kekuasaan negara harus dibagi tiga lembaga atau badan yang terpisah dan berbeda yang lain, yaitu, pertama, pembuat undang-undang, yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang. Kedua, eksekutif memiliki kekuasaan sesuai dengan hukum,. Ketiga adalah peradilan, yaitu memiliki kekuasaan memutuskan pelaksanaan undang-undang.

Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah segalanya. Warga negara dapat berbagi kekuasaan di dalam negara. Aristoteles juga mengatakan bahwa ketika seseorang hidup tanpa kebebasan untuk memilih jalan. (Anindya,R.,dan Musaffa, 2021:4)

Dari pendapat para ahli diatas, demokrasi adalah rakyat dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan, pengambil keputusan dan otoritas politik tertinggi negara dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kontrol atas penerapan kebijakannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, orang atau diwakili oleh badan perwakilan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat dua tahap yakni tahapan sebelum atau pra kemerdekaan dan tahapan sesudah atau pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami ketidakstabilan dari masa kemerdekaan sampai saat sekarang ini, permasalahan inti yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi itu

membentuk dirinya dalam berbagai sisi negatif kehidupan berbangsa dan bernegara. (Purnamawati, 2020:255).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa demokrasi Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan. Dengan demikian, sudah tidak asing lagi jika banyak permasalahan demokrasi yang terjadi dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia berdasarkan waktu terbagi menjadi empat fase, yakni:

1. Demokrasi Liberal/Parlementer (Periode 1945-1959)

Demokrasi parlementer di Indonesia adalah periode dimana sistem demokrasi parlementer diterapkan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang didasarkan pada model negara Belanda. Sistem ini mengakui kekuasaan legislatif yang kuat dengan parlemen sebagai lembaga yang paling utama. Pada saat itu ditandai dengan hal-hal stabilitas politik yang relatif karena beragamnya partai politik yang ada.

Ada satu peristiwa yang sangat penting pada zaman ini yaitu penandatanganan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1950, yang menggantikan Konstitusi UUD 1945 yang terjadi saat Konferensi Meja Bundar (KMB). Yang dimana konstitusi RIS membuat sistem pemerintahan yang federal dengan negara bagian yang lebih otonom, tetapi sayangnya sistem seperti ini tidak dapat berjalan dengan cukup baik dan akhirnya diakhiri pada tahun 1959. Saat era ini terjadi, banyak sekali partai-partai politik yang memainkan peran sangat penting dalam politik Indonesia saat itu. Beberapa partai-partai yang besar pada saat itu seperti lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Katolik. (Akbar dan Pahreji, 2023:131).

2. Demokrasi Terpimpin (Periode 1959-1965)

Dalam sistem demokrasi pada fase ini, ciri menonjolnya adalah lebih banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik. Dalam praktik pemerintahan, pada fase ini sudah banyak melakukan penyimpangan terhadap demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli bisa dianggap sebagai suatu upaya guna mencari solusi dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante yang merupakan satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi.

Demikian juga dalam UUD 1945 telah ditekankan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Dalam ketetapan MPRS Nomor 3/1963 yang disebutkan bahwa Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah mematahkan atau membatalkan pembatasan waktu lima tahun.

Banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap praktik demokrasi, khususnya pada bidang eksekutif, seperti Presiden diberi wewenang untuk terlibat di dalam bidang yudikatif. Hal demikian bisa ditemukan dalam UU Nomor 19 Tahun 1964, legislatif, presiden bisa melakukan tindakan politik didasarkan pada Peraturan tata tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 mengenai anggota DPR yang tidak bisa

mencapai fungsi. Demokrasi dipimpin Soekarno tidaklah demokrasi yang sesungguhnya, tapi sebagai bentuk otoriter. Bentuk demokrasi dipimpin ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi dipimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).

3. Demokrasi Pancasila Fase 1965-1998

Fase pemerintahan ini muncul sesudah berakhirnya G30SPKI. Landasan fase ini ialah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Ketetapan MPRS Nomor III Tahun 1963 yang menentukan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah digagalkan dan jabatan Presiden kembali menjadi selektif atau secara dipilih selama 5 tahun. Pada fase ini praktik demokrasi di Indonesia bertumpu pada nilai Pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu, demokrasi pada masa sekarang ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Sebab dalam demokrasi pancasila melihat kedaulatan rakyat sebagai pokok dari demokrasi, negara atau rakyat yang memiliki hak yang sama guna mengarahkan dan menetapkan haknya sendiri maunya seperti apa. Demikian pula keikutsertaan politik yang sama dengan semua rakyat. Untuk itu pemerintah seharusnya selalu memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam melaksanakan hak politik.

4. Demokrasi di Era Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia era reformasi memosisikan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Ditemukan berbagai indeks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers sebagai ruang terbuka untuk ikut terlibat dalam urusan kenegaraan dan berlakunya sistem multipartai, diberlakukannya ini nampak pada Pemilu tahun 1999.

Di era ini rakyat berpeluang untuk bersatu dan berkumpul sesuai paham ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik menonjol dari era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawasi demokrasi agar bisa terpakainya dalam segala aspek kehidupan. Ciri demokrasi di era reformasi yaitu adanya Pemilu yang lebih demokratis, terjadinya pergantian atau perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Motif rekrutmen politik terbuka untuk hak dasar warga Negara dan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dijalankan secara terbuka. Hak-hak warga negara terlindungi dan terjamin, dan sebagian besar hak asasi rakyat dapat terjamin seperti kebebasan dalam menyatakan opini, kebebasan pers dan lain-lain. (Irawano, 2016:78).

B. Problematika Demokrasi Di Indonesia

Seiring berjalannya demokrasi yang dimulai dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Demokrasi Indonesia mengalami dinamika dan tantangan pada setiap periodenya. Hal yang wajar seperti perjalanan suatu bangsa untuk menemukan sistem demokrasi yang ideal.

Periode Konstitusional. Seperti namanya, demokrasi konstitusional, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi

konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak berhak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Rumusan pembatasan kekuasaan pemerintahan dirumuskan oleh sejarawan Inggris Lord Acton yang menyadari bahwa rakyat tidak luput dari berbagai kelemahan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Salah satu pernyataannya yang terkenal adalah: "Kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan absolut pasti korup." Pernyataan ini menjadi pelajaran bagi publik tentang perlunya mengontrol tindakan pemerintah terkait dengan rezim di negaranya.

Periode demokrasi dipimpin di Indonesia dirundung beberapa masalah, yaitu konsepsi presiden pada 21 Februari 1957, kegagalan Konstituante meratifikasi UUD, dan Keputusan Presiden 5 Juli 1959. Keputusan Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal pokok. Pembubaran Majelis Konstituante, pemulihan UUD 1945 bukan UUD 1950, pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang terdiri dari anggota DPR dan wakil serta golongan.

Periode demokrasi Pancasila, masa ini adalah pemerintahan presiden Soeharto dan Orde Barunya. Saat ini sangat disayangkan, alih-alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi Pancasila yang digoncang Orde Baru hanya sebatas retorika politik. Dalam praktik bernegara dan berpemerintahan, para penguasa Orde Baru beroperasi jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Ketidakdemokrasian para penguasa orde baru ditandai dengan; dominannya peran militer (ABRI), Sentralisasi pengambilan keputusan politik, mensterilkan peran dan fungsi partai politik;

Periode Reformasi, setelah Orde Baru sering disebut Era Reformasi. Masa itu berkaitan erat dengan gerakan reformasi kerakyatan yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Tuntutan ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998 setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dalam demokrasi Pancasila. Kepergian para gubernur Orde Baru dari dasar negara. (H.Nihaya M, 2016:40)

Dari beberapa problem demokrasi yang telah dialami tiap periodenya, maka sebagaimana diidentifikasi oleh Dahl, seiring perkembangan jaman, Michael Saward (2003) mengatakan "demokrasi mengambil bentuk dan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktunya. Penting disadari bahwa "demokrasi harus diadaptasikan ke dalam kenyataan sosial yang ada agar mengakar dalam masyarakat." Dengan demikian, dapat digaribawahi, demokrasi yang berkesesuaian dengan kultur sosial masyarakat dari negara yang menganutnya, setidaknya dapat berkontribusi untuk implementasi Demokrasi yang lebih baik, khususnya yang berbasis kepada nilai kebebasan, kesetaraan dan keadilan. (Nurtina, 2013:3)

Maka dari uraian di atas dapat dimengerti untuk mencapai demokrasi yang ideal haruslah adanya sikap belajar untuk menyadari dan menggunakan hak-hak politik agar dapat menghargai setiap perbedaan dan pluralitas tanpa memaksakan kepentingan sendiri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi ialah pemerintahan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat yang dimana setiap rakyat memiliki hak dan kebebasan dalam berpendapat dan ikut serta dalam keputusan pemerintahan. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi dalam dua tahap yaitu tahap sebelum atau pra kemerdekaan dan tahap setelah atau pasca kemerdekaan. Perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia berdasarkan waktu dibagi menjadi empat fase, yaitu fase demokrasi liberal/parlementer (1945-1959), fase demokrasi terpimpin (1959-1965), fase demokrasi Pancasila (1965-1998), dan yang terakhir fase demokrasi di era reformasi.

Demokrasi di Indonesia mengalami dinamika dan tantangan pada setiap periodenya. Pada periode Konstitusional masa ini dibuatlah rumusan pembatasan kekuasaan pemerintahan dirumuskan oleh sejarawan Inggris Lord Acton yang menyadari bahwa rakyat tidak luput dari berbagai kelemahan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga pernyataan ini menjadi pelajaran bagi publik tentang perlunya mengontrol tindakan pemerintah terkait dengan rezim di negaranya. Pada periode demokrasi terpimpin ada beberapa masalah yang dialami, seperti konsepsi presiden pada 21 Februari 1957, kegagalan Konstituante meratifikasi UUD, dan Keputusan Presiden 5 Juli 1959. Pada periode demokrasi Pancasila ini, dalam praktik bernegara dan berpemerintahan, para penguasa Orde Baru beroperasi jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang terakhir pada periode reformasi, masa ini berkaitan erat dengan gerakan reformasi kerakyatan yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten.

REFERENSI

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5)
- Anindya, R., & Musaffa, M. U. A. (2021). Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 10(2)
- Irawan, B. B. (2016). *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat.
- Nihaya, N. (2011). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 6 No. 2,.
- Nurtina. (2013). *Makalah PKN Tentang Demokrasi di Indonesia*
<https://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-pkn-tentang-demokrasi-indonesia/>
- Purnamawati, E. (2020). *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. *Solusi*. Volume 18 Nomor 2
- Wasiyem, Purba, H., & Kaulan Karima, M. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship). Medan: CV Merdeka Kreasi Grup.